

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh total aset, PAD, pengawasan legislatif, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Data sampel penelitian yaitu sebanyak 506 LKPD di Indonesia tahun 2016. Hasil pengujian dan pembahasan pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian membuktikan bahwa total aset tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Besar kecilnya total aset yang diukur dengan total aset tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD.
2. Hasil penelitian membuktikan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu pemerintah daerah, maka semakin tinggi pula pengungkapan LKPD yang dilakukan pemerintah daerah tersebut.
3. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengawasan legislatif tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Banyak atau sedikit jumlah anggota DPRD suatu pemerintah daerah tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPDnya
4. Hasil penelitian membuktikan bahwa kelemahan SPI tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Banyak sedikitnya jumlah kelemahan SPI tahun sebelumnya yang ditemukan oleh BPK pada saat audit tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD.
5. Hasil penelitian membuktikan bahwa ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Banyak sedikitnya jumlah ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan tahun sebelumnya yang ditemukan oleh BPK pada saat audit tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD.
6. Hasil penelitian membuktikan bahwa total aset, PAD, pengawasan legislatif, kelemahan SPI, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikan sebesar 0,119 dari uji F.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan LKPD di Indonesia masih cukup rendah. Hal ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah guna pertimbangan membuat aturan pada tingkat internal maupun eksternal untuk meningkatkan kualitas pengungkapan LKPD. Penerapan *reward and punishment* secara tegas perlu dilakukan agar pemerintah daerah taat terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan sample yang digunakan dapat lebih banyak lagi dengan menambahkan periode LKPD yang lebih panjang sehingga hasil penelitian dapat lebih representatif dan lebih akurat sesuai dengan realisasi saat ini.
3. Menambahkan variabel lain sebagai faktor yang diduga memiliki keterkaitan dengan tingkat pengungkapan LKPD seperti jumlah pembiayaan, pengawasan APIP, tingkat pendidikan pegawai pemerintahan, proses seleksi penerimaan pegawai, jangka waktu penyusunan dan penerbitan LKPD, atau faktor-faktor lainnya.